

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan masalah gizi yang digunakan sebagai indikator status gizi kronis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia. Stunting menjadi salah satu masalah yang terjadi pada balita di dunia, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi kedua di Kawasan Asia Tenggara dan kelima di dunia (Supriyantoro, 2022). Stunting menjadi masalah yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang cukup dalam jangka panjang untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan pada balita, sehingga menyebabkan tinggi badan anak terhambat atau lebih rendah dibanding anak-anak seusianya. Stunting juga membawa dampak pada perkembangan otak pada balita dalam jangka panjang yang menyebabkan gangguan kesehatan mental, perkembangan intelektual serta konitif, dan risiko serangan penyakit kronis.

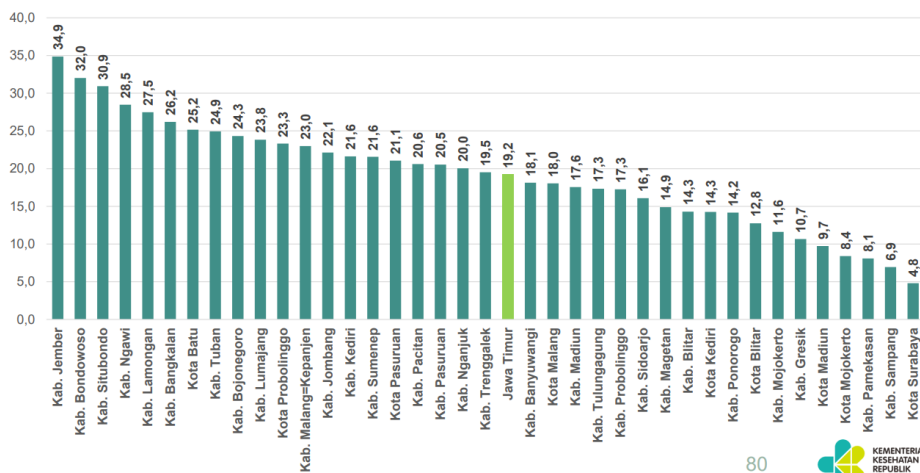
Jumlah anak stunting pada tahun 2020 sebanyak 149,2 juta, lebih rendah dibanding tahun 2000 sebanyak 203,6 juta dan menurun hingga 26,7%. Penurunan angka stunting ini dialami secara global, namun tidak merata di seluruh Kawasan, di wilayah Kawasan Asia dan Eropa mengalami penurunan namun di Kawasan Afrika dan Timur Tengah masih terdapat kenaikan (Jayani, 2021). Adapun Prevalensi stunting di Indonesia, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,8% yaitu dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Banyak faktor yang terkait dengan kejadian stunting. Salah satu diantaranya faktor status gizi pada balita dan ibu hamil yang buruk pada saat kehamilan, dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak (Sukirno, 2019). Meskipun terjadi penurunan prevalensi stunting dari tahun ke tahun, namun di Indonesia masih tergolong tinggi. Daerah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Faktor yang menyebabkan tingginya prevalensi stunting di desa antara lain akses yang terbatas terhadap pemenuhan gizi yang baik, sanitasi

yang masih buruk, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai stunting. Upaya untuk mengurangi stunting memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tingkat stunting di Indonesia memang telah mengalami penurunan daritahun ke tahun, namun angkanya masih tergolong tinggi. Stunting di daerah pedesaan bahkan cenderung lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain akses yang terbatas terhadap gizi yang baik, sanitasi yang masih buruk, pengetahuan masyarakat yang rendah tentang stunting, serta praktik kesehatan yang kurang memadai. Untuk mengurangi stunting, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dirilis Kemenkes menyebut Kabupaten Bondowoso menempati urutan kedua di Jawa Timur dalam prevalensi anak stunting, yakni mencapai 32,0% atau sekitar 32.000 anak. Angka tersebut naik 9,57% atau sekitar 198 kasus dari prevalensi anak stunting pada tahun 2022 sebesar 2,64%. Berikut data prevalensi stunting berdasarkan kelompok umur menurut Munira (2023), dalam Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di wilayah Jawa Timur :

PREVALENSI BALITA STUNTING (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR, SSGI 2022



Gambar 1 Prevalensi Stunting Di Wilayah Jawa Timur

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunting di Jawa Timur mencapai 19,2% pada 2022. Provinsi ini menduduki peringkat ke-25 dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia tahun lalu (SSGI, 2022) di Jawa Timur pada tahun 2022 berhasil menurunkan sekitar 3% angka stunting. Di Provinsi Jawa Timur, salah satu Kabupaten yang cukup tinggi angka stunting adalah Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut diindikasikan bahwa dari angka stunting atau balita kurang gizi di wilayah Bondowoso tergolong cukup tinggi. Diperlukan penanganan khusus, sebagai upaya penanganan penurunan stunting pada tahun 2022-2024 dan hal ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan RI.

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah yakni dengan program pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi pada balita dan ibu hamil semakin meningkat melalui beberapa peraturan terkait yakni Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/1622/2023 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknik Pemberian Makanan Tambahan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan stunting dan meningkatkan status gizi pada balita dan ibu hamil agar terhindar dari resiko terjadinya stunting dengan menetapkan berbagai kebijakan dan program yang harus diimplementasikan.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah makanan tambahan pangan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran. Pangan adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan yang selanjutnya disebut PMT Berbahan Pangan adalah makanan tambahan pangan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran.

Berdasarkan pra-riset yang dilakukan oleh peneliti, Desa Glingseran, yang terletak di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan angka prevalensi stunting dari

tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sebelumnya belum cukup efektif dalam mengatasi masalah gizi buruk di desa tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan status gizi pada balita dan ibu hamil di Desa Glingseran untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan upaya dengan melibatkan pemerintah desa dalam mendukung pencegahan stunting. Dalam peraturan ini peran pemerintah desa sangat penting untuk mendukung pencegahan stunting, seperti mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa (2019) Nomor 16 Tahun 2018, telah ditetapkan bahwa Dana Desa salah satunya diprioritaskan untuk meningkatkan layanan kesehatan di Desa yaitu upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting). Pemerintah Desa beserta seluruh lintas sektor ataupun tim percepatan penurunan stunting tingkat desa juga perlu mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat, melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran terkait stunting, merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk Intervensi Gizi Spesifik, menyediakan anggaran Intervensi Gizi Sensitif di tingkat desa, melibatkan keluarga sasaran program pencegahan stunting dalam proyek padat karya tunai, memenuhi kebutuhan sarana posyandu, menyelenggarakan rembuk stunting desa.

Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting. Intervensi gizi spesifik dengan mengintervensi secara langsung bagaimana pemenuhan gizi ibu hamil sampai bayi berusia 23 bulan. Sedangkan Intervensi sensitif yakni mengintervensi secara tidak langsung dalam memengaruhi kejadian stunting, misalnya perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana air bersih dan jamban yang sehat.

Intervensi gizi spesifik tersebut menjadikan ibu hamil dan balita 0-2 tahun atau rumah tangga 1.000 HPK menjadi sasaran prioritas. Pada intervensi gizi spesifik dengan intervensi prioritas yaitu ibu hamil diberikan makanan tambahan bagi ibu hamil dan suplementasi tablet tambah darah, sedangkan pada ibu menyusui dan anak 0-23 bulan diberikan promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak, tata laksana gizi buruk akut, pemantauan pertumbuhan, dan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut. Jika intervensi gizi spesifik dengan intervensi penting yaitu pada ibu hamil diberikan suplementasi kalsium dan pemeriksaan kehamilan, jika intervensi penting bagi ibu menyusui dan anak 0-23 bulan diberikan suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi zinc untuk pengobatan diare, suplementasi taburia imunisasi, dan manajemen terpadu balita sakit. Pada intervensi gizi spesifik yaitu remaja dan wanita usia subur serta anak 24-59 bulan sebagai sasaran penting. Pada intervensi prioritas dimana remaja dan wanita usia subur dapat diberikan suplementasi tablet tambah darah dan anak 24-59 bulan diberikan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut dan pemantauan pertumbuhan. Pada anak 24-59 bulan dapat diberikan diberikan suplementasi taburia, manajemen terpadu balita sakit, dan suplementasi zinc untuk pengobatan diare.

Pada intervensi gizi sensitif memiliki berbagai jenis intervensi diantaranya peningkatan penyediaan air minum dan sanitas melalui kegiatan akses sanitasi yang layak dan akses air minum yang aman. Intervensi ini seperti peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan melalui kegiatan akses jaminan kesehatan (JKN), akses pelayanan keluarga berencana (KB), akses bantuan uang tunai untuk keluarga mampu (PKH). Intervensi ini guna meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak yaitu melalui kegiatan penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, penyebaran informasi melalui berbagai media, penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akses pendidikan anak usia dini dan pemantauan tumbuh kembang anak, dan penyediaan konseling kesehatan serta reproduksi untuk

remaja. Intervensi peningkatan akses pangan bergizi melalui akses bantuan pangan non tunai untuk keluarga mampu, penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, akses fortifikasi bahan pangan utama.

Pada intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan berbagai program atau kegiatan yang dilakukan di dalamnya dengan melibatkan berbagai kelompok sasaran bisa menjadi upaya percepatan dalam pencegahan kasus stunting di Indonesia. Tentu perlunya bantuan dari berbagai pihak seperti pemerintah, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya guna mendukung berjalannya intervensi tersebut dalam menciptakan Indonesia bebas stunting.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan program pemberian makanan tambahan untuk mencegah terjadinya stunting di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan bagaimana penerapan kebijakan dengan judul “Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah menjelaskan Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis bagi pihak pemerintah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun evaluasi untuk melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

1.4.2 Manfaat Akademis

Manfaat penelitian secara akademis yaitu bagi program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini akan memperluas wawasan penelitian mahasiswa lainnya dan dapat menjadi dasar pengembangan atau referensi untuk menciptakan karya ilmiah.

1.4.3 Manfaat Subyektif

Manfaat penelitian secara subyektif adalah suatu sarana untuk mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori yang diperoleh dari Prodi Ilmu Pemerintahan.

